

SKRIPSI

KEKUATAN HUKUM HASIL TES URINE SEBAGAI ALAT BUKTI

DALAM PERKARA PIDANA NARKOTIKA



OLEH:

RACHMAD FIRMANSYAH

031211131021

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2020

**KEKUATAN HUKUM HASIL TES URINE SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM PERKARA PIDANA NARKOTIKA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

DOSEN PEMBIMBING,



Dr. ASTUTIK, S.H., M.H.
NIP. 19680303 1992032002

PENYUSUN,



RACHMAD FIRMANSYAH
NIM. 031211131021

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2020

ii

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada tanggal 30 Desember 2019

Tim Penguji Skripsi:

**Ketua : Dr. BAMBANG SUHERYADI, S.H., M.Hum.
NIP. 196809281997021001**



**Anggota : 1. Dr. ASTUTIK, S.H., M.H.
NIP. 196803031992032002**



**2. TAUFIK RACHMAN, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 198004172005011005**



**3. RIZA ALIFIANTO KURNIAWAN, S.H.,
MTCP.
NIP. 198104222006041002**



**4. SAPTA APRILIANTO, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 198104072005011001**

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RACHMAD FIRMANSYAH

NIM : 031211131021

Bidang Minat : PERADILAN

Judul Skripsi : KEKUATAN HUKUM HASIL TES URINE SEBAGAI ALAT
BUKTI DALAM PERKARA PIDANA NARKOTIKA

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 11 Januari 2020

Yang membuat pernyataan,



RACHMAD FIRMANSYAH

NIM. 031211131021

MOTTO

**“ Perompak bisa saja merusak kebun bunga,
tapi dia tidak bisa mencegah tibanya musim semi. “**

-rf

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat, karunia, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Kekuatan Hukum Hasil Tes Urine Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Narkotika”**. Tulisan ini merupakan refleksi dari penulis untuk menganalisis permasalahan hukum terutama dalam hukum pidana, sehingga *Insyah Allah* dapat memberikan ide, bekal maupun sumbangan pengetahuan akademik bagi penulis, akademisi, maupun praktisi hukum.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan yang diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan dari banyak pihak, baik bantuan moril, materil, maupun spiritual.

Pada kesempatan ini dengan penuh hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
2. Ibu Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
3. Ibu Dr. Astutik, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya dengan penuh kesabaran, mengarahkan,

membimbing dan senantiasa memberikan saran maupun masukan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

4. Tim Penguji Skripsi penulis, Bapak Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum., Bapak Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D., Bapak Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP., dan Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M., yang telah memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi.
5. Bapak Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn. selaku dosen wali yang selalu menuntun, memberikan semangat dan menginspirasi kepada penulis dalam menuntaskan segala kewajiban perkuliahan.
6. Seluruh dosen pengajar ketika penulis menempuh pada Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang menunjang ilmu penulis dalam ilmu hukum dan yang memberikan kepada saya kesempatan kuliah, belajar maupun menyelesaikan skripsi serta menyelesaikan masa studi.
7. Kedua orang tua, Eko Nuryanto, S.H. dan Rutji Hidayati, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan masukan, pengarahan, kasih sayang serta dorongan moril, materiil, maupun spiritual sebelum atau selama penyusunan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman dan sahabat penulis di Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya juga khususnya angkatan 2012 (Member Pantai), angkatan 2013 (Jamaah Reareo), angkatan 2014 (Keluarga Beringin), angkatan 2015 dan angkatan 2016 (Dewa Judi Macau), serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu maupun pihak

yang juga telah banyak memberikan bantuan atau sumbangan untuk isi dan substansi lainnya yang menunjang dalam tulisan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

9. Teman berpikir penulis, Dimas E.P, S.H., M.H., Dharma Setiawan Negara, S.H., M.H., Hanindya Seno Saskara dan Dimas Prasanto Kusuma, yang senantiasa menemani dan mendampingi penulis dalam mengerjakan skripsi.
10. Adam Prima Mahendra, sahabat didalam dan diluar aktifitas akademik yang setia menemani juga memberikan semangat.
11. Almamater penulis yaitu Universitas Airlangga Surabaya.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya yang tak terhingga atas segala bantuan dan dorongan yang diberikan kepada penulis. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangannya, mengingat pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis juga masih terbatas.

Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata dengan segenap kerendahan hati penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua serta seluruh pihak yang membutuhkan skripsi ini.

Surabaya, 11 Januari 2020

Penulis

Rachmad Firmansyah

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “KEKUATAN HUKUM HASIL TES URINE SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA NARKOTIKA” yang merupakan penelitian doktrinal normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, risalah putusan atau perundang-undangan yang relevan dan bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku, jurnal-jurnal, serta surat kabar cetak maupun elektronik. Atas bahan-bahan hukum tersebut dilakukan analisis guna menjawab rumusan masalah, yaitu Hasil Tes Urine Dijadikan Dasar Untuk Menetapkan Seseorang Sebagai Tersangka Penyalahguna Narkotika dan Klasifikasi Hasil Tes Urine Sebagai Alat Bukti Sebagaimana Ketentuan Pasal 184 KUHAP.

Tes urine merupakan salah satu metode yang digunakan untuk membuktikan adanya kandungan zat Narkotika dalam tubuh seseorang. Dalam rangka melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika penyidik berwenang melakukan tes urine terhadap seseorang yang diduga sebagai penyalah guna, sebagaimana diatur pada Pasal 75 huruf 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sampel urine yang telah diambil selanjutnya akan diuji berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di laboratorium uji narkotika yang kemudian dituangkan dalam berita acara hasil pengujian. Berita acara hasil pengujian merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan Pasal 184 KUHAP. Terhadap seseorang yang hasil tes urinenya positif dapat ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan Narkotika berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Tersangka penyalahgunaan Narkotika dapat dipidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

Kata Kunci : Tes Urine, Bukti Permulaan, Penetapan Tersangka, Alat Bukti Yang Sah.

ABSTRACT

This thesis is titled "THE LEGAL FORCE OF URINE TEST AS AN EVIDENCE IN NARCOTIC CRIMINAL CASE" which is a normative doctrinal study using the statutory approach and conceptual approach. The legal materials used consist of primary legal materials, namely the statutory regulations, minutes of relevant decisions or legislation and secondary legal materials, namely books, journals, as well as printed and electronic newspapers. The legal materials are analyzed to answer the problem formulation, namely the Urine Test Result Is Used as a Base to Assign Someone as a Suspect of Narcotics Abuse and Classification of Urine Test Results as Evidence as a Provision in Article 184 of the Criminal Procedure Code.

Urine test is one of the methods used to prove the existence of Narcotics substances in a person's body. In the context of carrying out the task of eradicating illicit abuse and illicit trafficking of Narcotics and Narcotics Precursors, the investigator has the authority to conduct urine tests on a person suspected of being an abuser, as stipulated in Article 75 letter l of Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics. The urine sample that has been taken will then be tested based on the development of science and technology in the narcotics testing laboratory which is then poured in the minutes of the test results. The minutes of the test results are valid evidence as determined by Article 184 of the Criminal Procedure Code. Someone who has a positive urine test result can be arrested and named as a suspect of narcotics abuse based on sufficient preliminary evidence. Suspects of abuse of Narcotics can be convicted in accordance with Article 127 paragraph (1) of the Narcotics Act.

Keywords: Urine Test, Preliminary Evidence, Determination of Suspect, Valid Evidence.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiii
PUTUSAN PENGADILAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Metode Penelitian	10
1.5.1 Tipe Penelitian	10
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	11
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	12
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	13
1.5.5 Analisis Bahan Hukum	14
1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika	14
BAB II DASAR PENETAPAN SESEORANG SEBAGAI TERSANGKA PENYALAHGUNA NARKOTIKA MELALUI TES URINE.....	16
2.1 Kewenangan Penyidik Dalam Melakukan Tes Urine.....	16
2.2 Bukti Permulaan yang Cukup Untuk Menetapkan Tersangka.....	24
2.3 Tes Urine Sebagai Bukti Permulaan Yang Cukup Dalam Menetapkan Tersangka	33
BAB III KLASIFIKASI HASIL TES URINE SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM KETENTUAN PASAL 184 KUHP.....	40

3.1	Alat Bukti Yang Sah Dalam Ruang Lingkup Hukum Acara Pidana	40
A.	Keterangan Saksi.....	42
B.	Keterangan Ahli	46
C.	Surat	48
D.	Petunjuk	51
E.	Keterangan Terdakwa	53
3.2	Hasil Tes Urine Sebagai Alat Bukti Yang Sah Sebagaimana Ditentukan Dalam Pasal 184 KUHP.....	54
BAB IV PENUTUP		58
4.1	Kesimpulan	58
4.2	Saran	59
DAFTAR BACAAN		xi

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062, selanjutnya disebut sebagai UU Narkotika).

Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009.

Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri No. 08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No. KEP-076/J.A/3/1984, No. Pol KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

PUTUSAN PENGADILAN

MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014
tanggal 30 Oktober 2014.

MAHKAMAH AGUNG RI

Putusan Pengadilan Militer Banda Aceh Nomor 28-K/PMI-01/AD/II/2015 tanggal
9 April 2015.